

## PERBEDAAN PENDIDIKAN AGAMA DI NEGARA JEPANG DAN NEGARA INDONESIA

**Deding Ishak**

STAI YAPATA Al-Jawami Bandung

Email: [dedingishak@yahoo.com](mailto:dedingishak@yahoo.com)

### Abstrak

Setiap negara memiliki perbedaan dalam kebijakan agama dan pendidikan. Perbedaan kebijakan ini juga terjadi di negara Indonesia dengan negara Jepang. Penelitian ini kemudian menganalisis perbedaan yang ada di dalam pendidikan agama di negara Jepang dan negara Indonesia dalam berbagai sisi. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data berasal dari hasil studi dan penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya perbedaan implementasi yang dilakukan oleh negara Jepang dan negara Indonesia. Negara Jepang tidak begitu peduli dengan pendidikan agama, sementara negara Indonesia mendukung penuh pendidikan agama di negaranya. Perbedaan ini tidak hanya disebabkan oleh karakter masyarakatnya saja, namun juga adanya perbedaan ideologi negara yang berbeda satu sama lain. Namun kedua negara tersebut memiliki peranan yang penting bagi pendidikan agama di negara masing-masing.

**Kata Kunci:** Pendidikan Agama, Ideologi Negara, Kebijakan Negara, Sekolah.

### Abstract

*Each country has differences in religious and educational policies. This policy difference also occurs in Indonesia and Japan. This study then analyzes the differences that exist in religious education in Japan and Indonesia in various aspects. This research was conducted using a qualitative approach. The data comes from the results of previous studies and research. The results of this study indicate that there are differences in the implementation carried out by Japan and Indonesia. Japan does not really care about religious education, while Indonesia fully supports religious education in their country. This difference is not only caused by the character of the people, but also the ideological differences of different countries. However, both countries have an important role for religious education in their respective countries.*

**Keywords:** Religious Education, State Ideology, State Policy, Schools.

### A. PENDAHULUAN

Setiap negara yang ada di dunia memiliki kebijakan pendidikan dan agama yang berbeda satu sama lainnya. Beberapa negara yang memiliki kebijakan sekuler melarang adanya pendidikan agama sebagai kurikulum di sekolah-sekolah negeri (Kholis & Praja, 2019). Namun negara-negara ini memberikan kebebasan bagi sekolah-sekolah swasta untuk memberikan pendidikan agama. Sebaliknya dengan negara Indonesia, pendidikan agama sangat di dukung oleh negara (Shunhaji, 2019). Dukungan ini dapat terlihat melalui kebijakan oleh negara bahwa pendidikan agama wajib menjadi kurikulum di sekolah-sekolah yang ada. Beberapa negara yang masyarakatnya erat dengan tradisi-tradisi keagamaan memiliki kebijakan yang sama dengan Indonesia (Arisanti, 2017).

Umumnya ideologi yang dianut oleh negara akan menentukan praktik pendidikan agama. Terdapat adanya beberapa model hubungan mengenai ideologi negara dengan pendidikan agama (Muliadi, 2012). Model yang pertama adalah negara sekuler yang melarang adanya pendidikan agama di sekolah negeri, namun memperbolehkan adanya pendidikan agama di sekolah swasta. Beberapa negara dengan ideologi ini adalah negara Jepang dan Amerika (Abdillah, 2015). Model yang kedua adalah negara yang memiliki ideologi sekuler, namun sebagian besar populasinya merupakan penduduk beragama tertentu. Negara-negara ini memperbolehkan pendidikan agama di sekolah negeri dan swasta. Contoh dari negara dengan ideologi ini adalah Jerman dan Austria (Junaidi, 2017).

Model yang ketiga adalah ketika ideologi dari negeri tersebut dimiliki oleh suatu agama tertentu. Dalam model ini, pendidikan agama diwajibkan untuk masuk ke dalam kurikulum sekolah negeri (Yulianti et al., 2018). Dalam model ini pendidikan agama yang dimaksudkan adalah pendidikan keislaman. Contoh dari negara-negara yang memiliki model ini adalah negara Pakistan dan negara Malaysia (Zarkasyi, 2015). Model keempat adalah negara yang sifatnya tidak sekuler, namun juga tidak keagamaan seperti Indonesia. Dalam model ini pendidikan agama diwajibkan hadir dalam kurikulum sekolah negeri dan juga swasta. Namun pendidikan agama ini tidak hanya sebatas agama Islam, namun seluruh agama lainnya yang diakui di negara Indonesia (Yaqin, 2016).

Dengan banyaknya model-model ini, maka kemudian penulis berniat untuk meneliti mengenai pendidikan agama yang terjadi di negara Jepang sebagai negara sekuler dengan negara Indonesia yang bukan negara sekuler ataupun negara keagamaan.

## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **1. Jepang dan Indonesia**

Negara Jepang memiliki populasi manusia sebanyak 126,3 juta orang pada tahun 2019. Sementara itu jumlah populasi manusia di Indonesia hampir berjumlah dua kali lipatnya, yakni sebanyak 270,6 juta (Liang & Paengkoum, 2019). Kemudian ideologi yang dimiliki oleh kedua negara juga cukup berbeda, di mana Indonesia memiliki ideologi berupa Pancasila, sementara Jepang memiliki ideologi sekuler. Pendidikan agama tampaknya kemudian akan dipengaruhi oleh ideologi yang dimiliki oleh negara masing-masing (Noor, 2016).

Melalui ideologi Pancasila, agama memiliki peranan yang penting bagi negara. Terdapat adanya enam agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia. Agama tersebut antara lain adalah Islam dengan populasi 87,2%; Kristen dengan populasi 7%; Hindu dengan populasi 1,7%; dan Konghucu (Humaidi, 2010). Sementara itu negara Jepang dengan ideologi sekuler yang dimilikinya sama sekali tidak dipengaruhi oleh keberadaan agama. Negara Jepang juga tidak memiliki agama resmi bagi negaranya serta namun negara Jepang memberikan kebebasan bagi beragama bagi warga negaranya berdasarkan pasal 20 dari undang-undang negaranya (Taniguchi & Thomas, 2011).

Negara Jepang sendiri tidak memiliki statistik resmi mengenai populasi warga negara Jepang dengan agama yang mereka percayai. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reischauer dan Jansen, sebanyak 70-80% warga negara Jepang merasa tidak berafiliasi dengan agama mana pun (Nuryatno, 2014).

Selain dari sisi agama, negara Indonesia juga terbagi atas perbedaan etnis, bahasa dan budaya. Negara Indonesia memiliki 300 kelompok etnis yang berbeda dengan 742 bahasa dan

dialek yang berbeda. Sebagian besar kelompok etnis tersebut terdiri atas orang Jawa dengan jumlah populasi sebanyak 42% (Djoendi et al., 2017). Dengan jumlah ini, etnis Jawa memiliki sifat dominan di Indonesia, baik dari sisi politik maupun budaya. Bahasa resmi di negara Indonesia adalah bahasa Indonesia, di mana bahasa ini menjadi mata pelajaran wajib di setiap kurikulum sekolah di dalam berbagai tingkatan. Banyak orang di Indonesia yang dapat menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, di mana sebagian besar bahasa daerah ini didominasi juga oleh bahasa Jawa (Gunawan & Sulistyoningrum, 2016).

Sementara itu Jepang memiliki budaya yang lebih homogen dalam bidang bahasa, di mana jumlah orang yang berbicara Jepang berjumlah 98,5%. Sementara itu minoritas orang Jepang lainnya menggunakan bahasa Korea, Tiongkok, Filipina, Brazil dan bahasa lainnya (Burgess, 2007). Mantan Perdana Menteri Jepang, Taro Aso, pernah memberikan pernyataan bahwa negara Jepang merupakan negara adalah negara dengan karakteristik “*one race, one civilization, one language and one culture*”.

## 2. Pendidikan Agama

Pendidikan agama merupakan suatu pendidikan yang memiliki fungsi untuk dapat menyiapkan seseorang agar dapat berperan sebagaimana agamanya memberi perintah. Pendidikan agama dapat diartikan sebagai suatu pembentukan kepribadian seseorang atau mengubah perilaku dan sikap seseorang agar sesuai berdasarkan ajaran agama tertentu (Bhoki, 2017). Pendidikan agama menurut ahli dapat diartikan sebagai suatu pendekatan dengan sifat yang menyeluruh kepada seseorang sebagai manusia kepada bagian fisik dan mentalnya.

Beberapa ahli lain berpendapat bahwa pendidikan agama dapat diartikan sebagai upaya yang sifatnya dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk dapat melaksanakan nilai-nilai dari agama tersebut dengan dilakukannya kegiatan pengajaran atau pelaksanaan bimbingan (Erwinsyah, 2017).

Sementara itu Grimmit memberikan tiga pengertian yang berbeda mengenai definisi pendidikan agama, yaitu *learning religion*, *learning from religion* dan *learning about religion*. Pendidikan agama dalam konteks *learning religion* dapat diartikan sebagai cara untuk mengirimkan suatu nilai, kepercayaan dan budaya agama dari satu generasi ke generasi berikutnya (Loudeslampi et al., 2019). Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara melestarikan dan mewarisi nilai dan tradisi agama ke dalam masyarakat. Dalam konteks *learning religion*, murid dari pendidikan agama memiliki sifat yang pasif karena menerima ilmu agama dari guru mereka secara satu arah saja. Sering kali proses pemberian nilai-nilai keagamaan ini dilaksanakan melalui indoktrinasi (Jannet, 2015).

Sementara itu pendidikan agama dalam konteks *learning from religion* memanfaatkan kebutuhan beragama dalam kehidupan manusia. Pendidikan agama dalam konteks ini berfokus kepada murid yang memiliki etiket yang baik terhadap pendidikan agama (Hambali & Yulianti, 2018). Pendidikan agama menekankan nilai-nilai keagamaan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh manusia. Dalam konteks ini tidak ada penilaian yang sifatnya kritis terhadap agama, karena agama dinilai sebagai suatu sumber ilmu dan dasar moral (Rosyad, 2019).

Konteks terakhir dari pendidikan agama adalah *learning about religion*. Melalui konteks ini agama dipelajari dengan tujuan yang sifatnya objektif dan deskriptif, tanpa mengambil nilai-nilai dari agama tersebut. Bentuk dari pendekatan ini memiliki sifat yang

objektif ketika mengajarkan seseorang mengenai suatu agama (Adibah, 2017). Pendidikan agama dalam konteks ini memiliki kontribusi untuk memperlakukan agama dengan kritik ataupun apresiasi. Dalam prosesnya, orang yang mempelajari agama dalam konteks ini harus menjauhkan dirinya dari agama karena hal tersebut merupakan objek dari studinya. Pendidikan agama kemudian dilaksanakan dengan menggunakan cara ilmiah ataupun logis, serta pentingnya penggunaan pikiran yang kritis (Imron, 2020).

Melalui berbagai pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama merupakan upaya dalam bentuk bimbingan ataupun asuhan kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut kemudian dapat mengerti hal yang ingin disampaikan oleh agama tersebut melalui penghayatan makna serta maksud dan tujuan yang kemudian dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemudian agama tersebut menjadi pandangan hidup miliknya.

### **C. METODE**

Penelitian akan dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis terhadap data yang ada. Data penelitian diperoleh melalui hasil penelitian dan laporan-laporan yang telah ada mengenai kebijakan beragama yang berada di berbagai negara di dunia, khususnya negara Jepang dan Indonesia.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Kebijakan Negara Terhadap Pendidikan Agama**

Indonesia merupakan negara yang memberikan dukungan kuat kepada pendidikan agama sebagai akibat dari besarnya peran agama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Adapun negara Jepang dengan ideologi sekulernya berusaha memberikan jarak yang jelas antara negara dengan agama. Hal ini kemudian menjadikan pendidikan agama tidak dibolehkan untuk diajarkan di sekolah negeri, namun tetap dibolehkan di sekolah-sekolah swasta. Melalui perbedaan ini, maka dapat ditemukan bahwa ideologi suatu negara memiliki hubungan yang erat dengan boleh tidaknya pendidikan agama di ajarkan di sekolah.

Terdapat adanya tiga pasal mengenai pendidikan agama dalam undang-undang negara Indonesia nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, di mana pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap murid yang bersekolah memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dipercayainya dan diajarkan oleh guru dengan agama yang sama. Pasal ini sendiri tidak memiliki masalah dengan sekolah negeri karena memang begitulah bagaimana sekolah negeri berjalan. Namun pasal ini kemudian menjadi bermasalah dengan beberapa agama di sekolah-sekolah swasta. Hal ini dikarenakan pasal ini tidak sesuai dengan hak komunitas untuk melaksanakan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaan komunitas tersebut. Kemudian hal ini juga dapat memberatkan bagi sekolah untuk menyiapkan guru agama yang berbeda kepercayaan dengan agama utama suatu sekolah. Banyak kasus di mana sekolah Kristen diisi oleh murid dengan agama Islam dibandingkan dengan murid Kristen itu sendiri. Adapun alasan banyak keluarga muslim menyekolahkan anaknya ke sekolah Kristen bukan karena alasan agama, namun bagusnya kualitas sekolah tersebut. Banyak sekali sekolah Kristen yang menunjukkan kualitas yang baik dalam hal pendidikan.

Pada praktiknya, pasal 12 ini belum dapat diimplementasikan secara penuh, di mana beberapa sekolah Kristen memilih untuk tidak menggelar pendidikan agama yang teratur, namun menggantinya dengan pengajaran agama serta berkomunikasi mengenai kepercayaan.

Pasal berikutnya dalam undang-undang negara Indonesia mengenai pendidikan agama adalah pasal 30 dan 37. Pasal 30 membahas mengenai pemeluk pendidikan agama, fungsi, konten dan bentuk dari pendidikan agama tersebut. Sementara itu pasal 37 membicarakan mengenai kewajiban sekolah dalam berbagai tingkatan untuk memasukkan elemen pendidikan agama ke dalam kurikulumnya.

Melalui berbagai pasal di atas, maka dapat dilihat bagaimana negara Indonesia sangat mendukung keberlangsungan pendidikan agama di negaranya. Tidak hanya wajib untuk dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, namun pendidikan agama juga dijelaskan secara detail. Sebaliknya dengan negara Jepang, negara ini tidak membolehkan untuk pendidikan agama di ajarkan di sekolah negeri, namun tetap dibolehkan di sekolah swasta. Sejauh ini hanya terdapat dua pasal yang membicarakan mengenai pendidikan agama di negara Jepang, yaitu Pasal 20 dalam Konstitusi Jepang dan pasal 15 dari undang-undang dasar mengenai pendidikan.

Pasal 20 dalam Konstitusi Jepang menjelaskan bahwa kebebasan untuk beragama diberikan kepada semua orang. Kemudian tidak akan ada organisasi agama yang mendapatkan hak istimewa dari negara ataupun boleh menjalankan otoritas politik apa pun. Tidak boleh ada orang yang merasa terpaksa untuk memeluk suatu agama serta negara dan bagian-bagiannya harus menjauhkan diri dari pendidikan agama ataupun kegiatan keagamaan lainnya. Sementara itu pasal 15 dalam UUD mengenai pendidikan menjelaskan bahwa sikap toleransi, pengetahuan umum dan kedudukan agama dalam hidup bermasyarakat harus dihargai dalam pendidikan.

Pasal 20 dari Konstitusi Jepang tidak hanya membahas mengenai pendidikan agama, namun lebih ke arah agama secara umum. Konten dari pasal ini dapat dibagi menjadi beberapa fokus. Yang pertama adalah perlindungan terhadap kebebasan beragama. Siapa pun bebas untuk mengikuti atau tidak suatu kepercayaan atau agama. Mengubah agama masing-masing merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang serta dilindungi oleh negara. Menurut hasil pengamatan oleh negara Amerika Serikat, kebebasan beragama benar-benar dijalankan dengan baik. Fokus kedua adalah pembentukan organisasi keagamaan diperbolehkan oleh negara, namun negara tidak akan memberikan dukungan finansial karena sikapnya yang harus netral dari organisasi keagamaan mana pun. Fokus yang terakhir adalah kebebasan seseorang untuk beragama, di mana dalam hal ini orang-orang bebas untuk dapat ikut ataupun tidak mengikuti kegiatan keagamaan. Dengan pernyataan bahwa negara dan bagiannya harus menjadi dari praktik keagamaan, maka negara memberikan pelarangan kepada pendidikan agama untuk muncul di kurikulum sekolah negeri. Tentunya dengan kebebasan beragama, maka sekolah swasta mendapatkan hak untuk menjalankan pendidikan agama di kurikulumnya. Sama halnya dengan berbagai negara-negara sekuler lainnya, terdapat adanya pembatasan yang jelas antara negara dengan agama serta pelarangan pendidikan agama di sekolah negeri.

## **2. Sejarah Pendidikan Agama**

Negara Jepang dan Indonesia memiliki perbedaan sejarah mengenai perkembangan pendidikan agama. Pendidikan agama telah menjadi pembahasan di negara Jepang sejak

periode Pemulihan Meiji pada tahun 1868, sejalan dengan modernisasi pendidikan di Jepang. Konstitusi Meiji diubah sejak tahun 1945 setelah kekalahan negara Jepang pada perang dunia II sehingga kemudian negara menjamin kebebasan beragama bagi warganya. Pada tahun 1945 inilah posisi pendidikan agama di sekolah negeri dan swasta berubah.

Hal ini kemudian berlaku sebaliknya dengan negara Indonesia, di mana pada tahun 1945 berbarengan dengan kemerdekaannya, pendidikan agama cukup hangat diperdebatkan. Sejak kemunculannya, pendidikan agama khususnya pendidikan Islam, telah didukung oleh negara dengan memasukkan pendidikan agama ke dalam kurikulum. Namun implementasi dari pendidikan agama di Indonesia memiliki sifat yang dinamis tergantung dengan siapa yang memerintah pada saat itu. Hal ini kemudian menyebabkan perkembangan pendidikan agama di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu era Soekarno, era Soeharto dan era reformasi.

Berdasarkan sejarahnya negara Indonesia dan Jepang memiliki perbedaan dalam pendidikan agama. Sejak merdeka, negara Indonesia tidak memiliki ketegangan antara pendidikan agama dengan negara. Pada tahun 1950 pendidikan keagamaan diajarkan di berbagai sekolah-sekolah. Persyaratan dalam pendidikan agama hanya perlu adanya minimal 10 murid yang semuanya memiliki izin dari orang tua mereka. Semua hal yang berhubungan dengan pendidikan agama diawasi oleh Kementerian Agama. Kemudian pada tahun 1952 setiap agama memiliki praktik yang berbeda dalam aplikasi pendidikan agamanya. Lalu pada tahun 1960 pendidikan agama menjadi subjek yang harus dipelajari di sekolah negeri selama orang tua mengizinkan hal tersebut. Hal ini berbeda jauh dengan negara Jepang, di mana terdapat ketegangan yang terjadi di antara sekolah Kristen dengan negara. Pada masa Restorasi Meiji, sekolah swasta diperbolehkan untuk mengajarkan pendidikan agama. Ketika pemerintah mencabut pelarangan pengajaran agama Kristen pada tahun 1873, terdapat banyak sekolah swasta baru yang muncul. Kemunculan ini kemudian membuat pemerintah menyadari kehadiran sekolah-sekolah ini, karena mereka mengajarkan Tenno yang memiliki hubungan yang dekat dengan agama Shinto. Pemerintah sendiri berpendapat bahwa Tenno hanya dapat diperoleh melalui agama Shinto. Pengajaran Tenno inilah yang kemudian menyebabkan negara Jepang memisahkan pendidikan dari agama. Hasilnya semua sekolah pada tahun 1889 yang berada di bawah pemerintah dilarang untuk mengajarkan agama sama sekali.

Kemudian pada era Suharto, pendidikan agama didukung oleh negara. Pada awal kekuasaannya, negara menghadapi dua pihak yang ekstrem, yaitu komunisme dan muslim radikal. Salah satu langkah dalam mengatasi kedua pihak ini adalah dengan mengaplikasikan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Kebijakan ini memiliki dua misi utama, yaitu melawan komunisme sebagai musuh negara dan menunjukkan bahwa negara mendukung agama. Dapat dikatakan bahwa Soeharto menggunakan pendidikan agama untuk melawan komunisme dan pemeluk agama radikal.

Perbedaan lainnya dalam pendidikan agama berdasarkan sejarahnya di negara Jepang dan Indonesia adalah pendidikan agama dalam sekolah negeri dan swasta. Pada awalnya, hanya sekolah negeri yang diwajibkan untuk memiliki pendidikan agama di Indonesia. Namun pada tahun 1989 kewajiban ini juga diberikan kepada sekolah swasta. Namun sekolah swasta di larang untuk mengajarkan agama yang bukan agama utama sekolah tersebut.

Sementara itu di negara Jepang sekolah swasta memiliki otoritas untuk mengajarkan pendidikan agama. Kemudian pada tahun 1889 pelarangan terhadap pendidikan agama

diberlakukan di semua sekolah, hingga akhirnya pada tahun 1945 pendidikan agama diperbolehkan kembali, namun hanya bagi sekolah swasta saja.

Kemudian melihat sejarah hubungan antara negara dengan agama tertentu, dapat dilihat adanya sejarah yang berbeda. Agama Islam merupakan agama yang dipercayai oleh mayoritas orang Indonesia, sementara Shinto dipercayai oleh mayoritas orang Jepang. Negara Indonesia sangat mendukung adanya pendidikan agama di negaranya, hingga dalam beberapa kasus, adanya pemberian keuntungan bagi agama Islam di negara tersebut. Sementara itu dukungan negara Jepang pada agama Shinto masih dianggap kurang jelas, karena negara tersebut memisahkan diri dari agama. Walaupun begitu, pendidikan moral di Jepang yang diimplementasikan di berbagai sekolah mengandung beberapa unsur ajaran Shinto. Sampai akhir, pendidikan agama di sekolah negeri tetap dilarang, karena hal ini bertentangan dengan ideologi negara. Setelah kekalahan negara Jepang pada tahun 1945, Restorasi Meiji di ubah, sehingga kemudian pendidikan moral yang mengandung ajaran Shinto dihilangkan, namun sebagai gantinya sekolah-sekolah swasta diperbolehkan untuk mengadakan pendidikan agama.

### **3. Pendidikan Agama di Sekolah**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia merupakan negara yang sangat mendukung pendidikan agama di sekolah. Bahkan bukan hanya dibolehkan, namun eksistensi sekolah agama diwajibkan untuk hadir di sekolah negeri dan swasta. Sementara itu di negara Jepang peraturan yang ada secara jelas melarang pendidikan agama di sekolah negeri agar sekolah menjadi netral dari agama.

Di negara Indonesia, semua murid dari berbagai tingkatan wajib untuk memperoleh pendidikan agama, serta sekolah wajib untuk menyediakannya. Namun terdapat adanya perbedaan jumlah waktu yang dilaksanakan oleh satu sekolah dengan sekolah lainnya. Beberapa sekolah memberikan empat jam pendidikan agama per minggu, sementara sekolah lainnya dapat memberikan pendidikan agama hingga enam jam per minggunya. Karena Islam bukanlah ideologi dari Indonesia, maka pendidikan agama yang dilaksanakan tidak hanya agama Islam saja, namun juga agama Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Karena perbedaan inilah kemudian setiap murid mendapatkan pendidikan agama yang berbeda dengan guru yang berbeda pula.

Kondisi yang berbeda kemudian muncul di negara Jepang, di mana secara gamblang pemerintah harus menjauhi hal yang berhubungan dengan agama. Namun pentingnya pendidikan moral berbasis pemikiran agama diketahui oleh negara Jepang, sehingga pada tahun 1949 Kementerian Pendidikan Jepang memberikan kebebasan bagi sekolah untuk mengunjungi fasilitas keagamaan dan mempelajari materi keagamaan dengan tujuan pendidikan dan budaya.

Walaupun ketatnya pendidikan agama di sekolah negeri, namun pengajaran pendidikan moral yang memiliki unsur keagamaan memberikan tujuan untuk hidup dengan baik. Seluruh murid diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan ini, karena di dalamnya sama sekali tidak ada hal yang buruk. Kemudian sekolah Jepang juga memberikan materi mengenai dasar-dasar agama besar, seperti Kristen, Buddha, dan lainnya untuk mengetahui mengenai manusia. Dalam pelajaran lainnya, agama juga dianggap bagian dari pelajar sejarah, sehingga beberapa kali dipelajari demi ilmu pengetahuan.

Berbeda dengan sekolah negeri, sekolah swasta yang memiliki afiliasi dengan agama tertentu memiliki kebebasan untuk memberikan pendidikan agamanya di sekolah mereka. Berdasarkan undang-undang yang berada di Jepang, pendidikan agama dibolehkan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum mereka. Terdapat lebih dari seratus sekolah swasta yang ada di negara Jepang dan terafiliasi dengan suatu agama tertentu. Sebanyak 25% sekolah swasta di negara Jepang terafiliasi dengan agama tertentu.

Walaupun sekolah dengan afiliasi agama ini cukup banyak, namun jumlah ini ternyata tidak memiliki hubungan dengan kenaikan jumlah orang beragama di negara Jepang. Berdasarkan penelitian dari Takahata, ketiadaan hubungan ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah murid-murid yang masuk ke sekolah swasta dengan afiliasi agama tersebut bukanlah orang-orang yang beragama atau memiliki agama yang berbeda. Yang kedua adalah alasan mereka memilih sekolah swasta tersebut bukan karena alasan agama, namun karena kualitas, reputasi dan gengsi yang dimiliki oleh sekolah tersebut, sehingga diharapkan mereka dapat masuk ke dalam universitas yang bagus.

#### **4. Pendidikan Agama dan Perilaku Murid**

Menganggap pendidikan agama sebagai satu-satunya faktor yang mempengaruhi perilaku murid adalah sebuah kesalahan. Hal ini dikarenakan perilaku seseorang tentunya ditentukan oleh berbagai hal seperti keluarga, budaya sekolah, masyarakat, dan banyak lainnya. Namun mengatakan bahwa pendidikan agama tidak berpengaruh kepada perilaku seseorang juga merupakan hal yang salah, karena sebagian besar tujuan dari pendidikan agama adalah untuk dapat meningkatkan perilaku murid menjadi lebih baik.

Membandingkan hubungan yang dimiliki oleh pendidikan agama dengan perilaku murid di negara Indonesia dan Jepang adalah hal yang cukup sulit. Di negara Indonesia, terdapat banyak sekali laporan mengenai kekerasan yang muncul sekolah-sekolah tingkat menengah dan atas. Dalam beberapa kasus parah hal ini dapat menimbulkan kematian. Kekerasan yang dimaksud dapat berupa pertarungan kecil hingga melakukan vandalisme yang dapat merusak fasilitas umum. Banyaknya jumlah kekerasan ini menyebabkan berbagai media massa memberitakan hal ini. Dapat dikatakan bahwa dalam beberapa kasus, pendidikan agama sama sekali tidak memiliki kontribusi bagi perilaku murid-murid sekolah. Walaupun terdapat adanya kewajiban dari pemerintah kepada sekolah untuk mengajarkan murid-muridnya pendidikan agama, namun hasil dari pengajaran tersebut perlu dipertanyakan. Kegagalan pendidikan agama dalam meningkatkan perilaku murid menghasilkan kritikan tajam. Kritikan ini berpendapat bahwa pendidikan agama yang diberikan sifatnya adalah keilmuan yang diberikan melalui indoktrinasi, sehingga kemudian pendidikan agama tidak memiliki dampak bagi perilaku, karena pendidikan agama hanya diterima sebagai ilmu pengetahuan saja tanpa adanya penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan negara Jepang, di mana cukup sulit untuk mendapatkan berita mengenai adanya perkelahian antar murid. Para murid sebagian besar sangat disiplin, pekerja keras dan mengikuti peraturan sekolah. Tak ditemukan di media massa, media sosial atau televisi mengenai kekerasan oleh murid. Tidak ditemukan juga hal serupa di ruang-ruang publik. Apakah perilaku baik ini dihasilkan oleh pendidikan agama yang berhasil? Kemungkinan yang terjadi adalah hasil ini bukan disebabkan oleh pendidikan agama. Hal ini dikarenakan tidak semua murid yang menerima pendidikan agama di sekolah mereka. Hanya

25% dari total sekolah swasta yang menerima pendidikan agama di kurikulum mereka. Kemudian murid-murid yang belajar di sekolah negeri hanya menerima sedikit unsur keagamaan melalui pendidikan moral dan sejarah. Terlebih banyak sekali murid yang pada dasarnya tidak begitu peduli dengan agama, serta alasan mereka masuk ke dalam sekolah swasta dengan afiliasi agama tertentu karena bagusnya kualitas dari sekolah tersebut.

Perilaku murid Jepang tampaknya disebabkan oleh sifat-sifat masyarakat Jepang, seperti budaya toleransi, menghormati orang lain, pekerja keras, loyal, dan sebagainya. Hal-hal ini bukan disebabkan oleh pendidikan agama, namun oleh tradisi terdahulu yang berasal dari prinsip Shinto dan telah diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Walaupun terdapat banyak sekali perubahan sebagai akibat dari modernisasi dan liberisasi, namun fondasi yang orang-orang Jepang miliki asih berdiri secara utuh, sehingga masyarakat Jepang kemudian tidak kehilangan identitas dan nilai tradisional mereka.

## E. KESIMPULAN

Implementasi pendidikan agama di sekolah bergantung kepada ideologi yang dimiliki oleh suatu negara. Negara Indonesia dan Jepang merupakan negara dengan ideologi yang berbeda, sehingga implementasi pendidikan agama juga akan berbeda. Indonesia dengan ideologi Pancasila mendukung penuh kehadiran pendidikan agama di seluruh sekolah melalui peraturan dan kebijakan, sementara negara Jepang dengan ideologi sekulernya melarang kehadiran pendidikan agama di sekolah, walau kemudian memperbolehkannya di sekolah swasta. Cukup menarik melihat pendidikan agama di Indonesia tidak selalu memberikan hasil yang positif, melihat banyaknya kekerasan oleh para murid. Sementara itu, para murid di Jepang menjalankan peraturan di sekolah dan masyarakat dengan baik dan benar, walaupun sedikit sekali murid yang mempelajari pendidikan agama. Nilai dari tradisi terdahulu di negara Jepang tampaknya memberikan efek yang lebih besar dibandingkan pendidikan agama.

## REFERENSI

- Abdillah, M. (2015). *Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Prenada Media.
- Adibah, I. Z. (2017). Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam. *INSPIRASI: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1(1), 1-20.
- Arisanti, D. (2017). Implementasi pendidikan akhlak mulia di SMA Setia Dharma Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 2(2), 206-225.
- Bhoki, H. (2017). Peran Katekis Dalam Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Abad 21. *Atma Reksa: Jurnal Pastoral dan Kateketik*, 2(1), 70-85.
- Burgess, C. (2007). Jepang yang multikultur? Wacana dan Mitos Homogenitas. *terj. Dipo Siahaan, dkk. dalam The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*.
- Djoendi, S., Hagijanto, A. D., & Arini, B. D. (2017). Perancangan Buku Cerita Bergambar Bertema Bhinneka Tunggal Ika untuk Anak-anak. *Jurnal DKV Adiwarna*, 1(10), 10.
- Erwinskyah, A. (2017). Manajemen kelas dalam meningkatkan efektifitas proses belajar mengajar. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 87-105.
- Gunawan, I., & Sulistyoningrum, R. T. (2016). Menggali Nilai-Nilai Keunggulan Lokal Kesenian Reog Ponorogo Guna Mengembangkan Materi Keragaman Suku Bangsa Dan

- Budaya Pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV Sekolah Dasar. *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran*, 3(01).
- Hambali, M., & Yulianti, E. (2018). Ekstrakurikuler keagamaan terhadap pembentukan karakter religius peserta didik di kota majapahit. *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 193-208.
- Humaidi, Z. (2010). Islam dan Pancasila: Pergulatan Islam dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(2), 37097.
- Imron, A. (2020). Telaah Pemikiran Pendidikan dan Etika Sosial Ahmad Qodri Abdillah Aziziy. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 1(1), 47-66.
- Jannet, H. (2015). Pendidikan Agama Dalam Kultur Sekolah Demokratis: Potensi Membumikan Deradikalisasi Agama di Sekolah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 23(1), 51-68.
- Junaidi, A. (2017). Kebijakan Politik Recep Tayyip Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 6(1).
- Kholis, N., & Praja, T. S. (2019). Kebijakan Eropa terhadap Pendanaan, Kurikulum, dan Guru Sekolah Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 7(1), 19-36.
- Liang, J. B., & Paengkoum, P. (2019). Current status, challenges and the way forward for dairy goat production in Asia—conference summary of dairy goats in Asia. *Asian-Australasian journal of animal sciences*, 32(8), 1233.
- Luodeslampi, J., Kuusisto, A., & Kallioniemi, A. (2019). Four religious education teachers: Four retrospective career trajectories. *Religions*, 10(8), 474.
- Muliadi, E. (2012). Urgensi pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural di sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 55-68.
- Noor, F. (2016). Perilaku politik pragmatis dalam Kehidupan politik Kontemporer: Kajian atas menyurutnya peran ideologi politik di Era reformasi. *Masyarakat Indonesia*, 40(1), 57-74.
- Nuryatno, M. A. (2014). Comparing religious education in Indonesia and Japan. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 52(2), 435-458.
- Rosyad, A. M. (2019). The Implementasi Nilai-Nilai Multikulturalisme Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (The Implementation of Multiculturalism Values Through Learning of Islamic Religion Education). *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(1, March), 1-18.
- Shunhaji, A. (2019). Agama dalam Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 1-22.
- Taniguchi, H., & Thomas, L. D. (2011). The influences of religious attitudes on volunteering. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 22(2), 335-355.
- Yaqin, N. (2016). Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 93-105.
- Yulianti, H., Iwan, C. D., & Millah, S. (2018). Penerapan Metode Giving Question and Getting Answer Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam [SL]*, 6(2), 197-216.
- Zarkasyi, H. F. (2015). Sistim Pendidikan dan Pengkajian Islam di Pesantren Dalam Kontek Dinamika Studi Islam Internasional. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 13(3).